

**MOTIVASI PEMERINTAH SKOTLANDIA MELAKUKAN
REFERENDUM SEBAGAI UPAYA PEMISAHAN DIRI DARI BRITANIA
RAYA PADA TAHUN 2014**

Oleh:

Rinaldo Dwi Putra

(dwiputrarinaldo@yahoo.com)

Pembimbing: Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

Bibliografi: 12 Buku, 8 Jurnal, 5 Dokumen Resmi, dan 37 Situs

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau-Pekanbaru

Kampus Bina Widya JL.HR Subrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293

Abstract

This research describes about the motivation of the Scottish Government for a referendum as an attempt secession from the United Kingdom in 2014. The United Kingdom are a combination of England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Scotland's area are 78.772 km² or covers one-third of the United Kingdom. The Scottish government have different views and ideas with the British Government on policy making in some sectors. Scotland also has a great potential in the oil and gas resources that should be able to support the national economy.

This research using qualitative method that collect data related from various sources. The writer collects data from books, encyclopedia, journals, mass media, and websites to analyze about motivation of Scottish Government conduct a referendum on independence. The theory applied in this research is the perspective of realism to the theory of 'public policy' by William N. Dunn.

The results of this research shows that the Scottish Government's ambition to make Scotland a more democratic, build more prosperous country, and realize a more equitable society. Scotland's Referendum was held on September 18, 2014, with the result that 55.25 percent of the people of Scotland choose to still be a part of the United Kingdom and 44.65 percent choose independence.

Key words: *referendum, public policy, national economy*

Pendahuluan

Britania Raya atau United Kingdom (UK) adalah salah satu negara multi bangsa karena terdapat lebih dari satu identitas kebangsaan, yaitu bangsa Inggris (English), bangsa Skotlandia (Scottish), bangsa Wales (Welsh), dan bangsa Irlandia Utara (Irish) yang terbagi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Tiga negara selain Inggris ini memiliki pemerintahan tersendiri yang berbeda-beda kekuasaannya

dan berpusat di ibu kota masing-masing yaitu Edinburgh, Cardiff, dan Belfast.

Pemerintah Britania Raya yang berpusat di Westminster, London (Inggris) bersikap hati-hati dalam memperlakukan ketiga bangsa di wilayah lain dengan menetapkan kebijakan yang akomodatif untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengekspresikan budaya yang merupakan bagian dari identitas kebangsaan. Serta dalam

bidang politik, Pemerintah Britania Raya juga membentuk pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan tertentu terhadap daerahnya sendiri.

Secara politik dan sistem hukum, Skotlandia masih terpisah dari Inggris, Wales dan Irlandia Utara. Skotlandia menerapkan yurisdiksi yang berbeda dalam hukum publik dan hukum privat sedangkan untuk Wales dan Irlandia Utara secara politik masih belum berkeinginan untuk merdeka.

Pada pemilihan umum Parlemen Skotlandia tahun 2011, Scottish National Party (SNP) yang merupakan partai nasionalis berhasil meraih kursi mayoritas di Parlemen Skotlandia dan memenangkan suara terbanyak sehingga SNP menjadi partai pemerintah Skotlandia. Dari kemenangan itulah, SNP mengajukan untuk mengadakan referendum untuk menentukan pemisahan diri Skotlandia dari UK yang menurut rencana akan dilaksanakan pada 18 September 2014. Usulan pemisahan diri yang diajukan oleh Pemerintah Skotlandia ini mengundang berbagai respon dari masyarakat, pemerintah UK, maupun dari partai lain. Pemerintah UK, meskipun kurang menyetujui ide pemisahan diri ini, tetap memberikan kesempatan bagi Skotlandia untuk mengadakan referendum.

Pemerintahan dan Parlemen Skotlandia saat ini tidak dikuasai oleh partai kiri melainkan oleh partai nasionalis (Scottish National Party), yang dikritik bergaris politik reaksioner karena kecenderungan memisahkan dirinya dari Inggris. Skeptisisme pada ide Skotlandia merdeka, berdasarkan pula pada perbandingan dengan pengalaman Irlandia yang merdeka dari Inggris secara resmi sejak tahun 1948 dan

ternyata tetap menjalankan ekonomi politik kapitalisme.

Pertumbuhan ekonomi Inggris pada tahun 2014 sebesar 3 persen, sementara itu pertumbuhan ekonomi Skotlandia tertinggal 0,2 persen di posisi 2,8 persen. Selisih angka pertumbuhan ekonomi yang timpang ini menjadi pemicu kekecewaan rakyat Skotlandia yang merasa terlalu dikendalikan oleh kebijakan pembangunan sentralistik di London. Skotlandia dianggap kawasan perifer atau terpinggir, kekuatan ekonomi Skotlandia selama 300 tahun lebih di bawah kuasa Pemerintahan di London dianggap kurang menjadi prioritas pembangunan. GDP per kapita Inggris 22,336 pounds sementara Skotlandia 26,424 pounds. Pada tahun 2012, proporsi penduduk Skotlandia sebesar 8,3 persen dari total penduduk di Inggris. Namun Skotlandia menyumbang sebesar 9,9 persen terhadap seluruh penghasilan pajak di Inggris (UK). Hampir 20 persen pendapatan pajak Skotlandia berasal dari minyak dan gas. Angka ini cukup besar dalam menyumbang pendapatan migas Inggris sebesar 27 juta pounds pada tahun 2012. Wilayah Skotlandia juga memiliki cadangan minyak yang sangat besar setara 120 juta pounds. Dari sisi tenaga kerja, ditengah perlambatan ekonomi di Eropa angka pengangguran di Skotlandia terbilang tinggi yaitu 7,5 persen.

Sekarang ini walaupun Skotlandia tergabung dalam pemerintahan Britania Raya, akan tetapi dengan sistem yang berbeda dari Britania Raya maka pemerintahan daerah Skotlandia, yang menjadikan identitas nasional dan budaya Skotlandia, tetap mencirikan identitas Skotlandia yang

sebenarnya tanpa adanya pembauran identitas dari negara-negara bagian Britania Raya lainnya. Hal ini juga menjadi faktor penentu akan kuatnya nasionalisme masyarakat Skotlandia akan negara dan budayanya sendiri sehingga mendorong terlaksananya referendum yang sukses pada tahun 1997 sehingga Skotlandia memiliki parlemen dalam negeri sendiri (pemerintah devolutif) yang mengatur urusan-urusan dalam negeri yang terdiri dari Pemerintah Skotlandia dan Parlemen Skotlandia akan tetapi kedudukannya tetap berada dibawah kekuasaan Parlementer Britania Raya.

Kerangka Teori

Interest atau kepentingan adalah setiap politik luar negeri suatu negara yang didasarkan pada suatu kepentingan yang sifatnya relatif permanen yang meliputi tiga faktor yaitu sifat dasar dari kepentingan nasional yang dilindungi, lingkungan politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kepentingan tersebut, dan kepentingan yang rasional. Kepentingan nasional adalah merupakan pilar utama tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realistis karena kepentingan nasional menentukan tindakan politik suatu negara.

Jika menggunakan pendekatan realis atau neorealis maka kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan negara sebagai unitary actor yang penekanannya pada peningkatan national power (kekuasaan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan survival dari negara tersebut. Apa yang dianggap sebagai kepentingan nasional oleh kaum realis mungkin merepresentasikan kepentingan yang kebetulan pada

momen tertentu mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri.

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu negara terhadap negara lain.

Menurut Hans J. Morgenthau didalam "The Concept of Interest defined in Terms of power", Konsep Kepentingan Nasional (Interest) yang didefinisikan dalam istilah "power" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau "reason" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional. Konseptualisasi kepentingan (interest) dalam formulasi power dimanifestasikan ke dalam tataran politik internasional, mendasari pemikiran teori realisme politik akan memberikan kerangka bangunan teoretis terhadap politik luar negeri.

Morgenthau berpendapat bahwa strategi diplomasi berdasarkan kepada kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut digunakan untuk mengejar power yang bisa digunakan untuk membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Menurut Morgenthau, dengan memiliki power maka suatu negara dapat mengadili negara lain seperti mengadili negara sendiri dan kemudian dapat meningkatkan kepentingan negara yang memiliki power.

Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik paksaan, atau kerjasama (cooperation), karena itu, kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.

Sebuah teori yaitu kebijakan publik adalah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya. Kebijakan publik yang transparan dan partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula.

Menurut **William N. Dunn**, kebijakan publik (public policy) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya. Menurut David Easton, kebijakan publik adalah alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.

Sebuah proses kebijakan merupakan sebuah proses yang multilinear dan kompleks. Atau dengan kata lain, kompleksitas sosok

arena kebijakan (masyarakat dan negara) turut mewarnai proses kebijakan yang ada. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadi karena sebuah proses kebijakan selalu lahir dan besar pada 'ruang dan waktu' yang tak kosong.

Pembahasan

Tujuan pembentukan negara dapat berbeda berdasarkan filosofi, situasi atau kondisi, dan sejarah dari masing-masing negara. Secara garis besar, tujuan negara terbagi atas tiga arah, yaitu mencapai kekuasaan politik, mencapai kemakmuran material, dan mencapai kebahagiaan akhir.

Motivasi Pemerintah Skotlandia Melakukan Referendum sebagai upaya pemisahan diri dari Britania Raya pada tahun 2014 adalah karena Kekayaan Sumber Daya yang Seharusnya Dapat Memakmurkan Skotlandia Tidak Dikelola dengan Baik oleh Pemerintah Britania Raya, Pemerintah Britania Raya Dinilai Tidak Memprioritaskan Keadilan Kesejahteraan Skotlandia Sehingga Masih Terjadi Kesenjangan Sosial, dan Skotlandia Merasa Terlalu Dikendalikan oleh Kebijakan Pemerintah Britania Raya yang Dianggap Tidak Demokratis. Beberapa sektor yang menjadi sorotan oleh Pemerintah Skotlandia antara lain Lingkungan, Minyak dan Gas, Pasar Energi Skotlandia, Sistem Peradilan, Sistem Perlindungan Sosial, Konstitusi, Pemerintahan dan Warga Negara, Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia, serta Layanan Publik.

Skotlandia memiliki lingkungan alam serta keanekaragaman hayati yang spektakuler dan kaya. Pemerintah

Skotlandia mengakui bahwa aset alam ini mendukung perekonomian, kesehatan, dan kesejahteraan bagi penduduk Skotlandia maupun wisatawan. Pemerintah Skotlandia ingin menjadi pelopor lingkungan hidup berkelanjutan untuk membangun bangsa yang bersih, hijau dan bebas nuklir di masa depan.

Undang-undang tentang perubahan iklim yang disahkan oleh Parlemen Skotlandia pada tahun 2009 menunjukkan suatu pendekatan progresif Skotlandia untuk melindungi dan melestarikan lingkungan sekaligus mempertahankan citra Skotlandia di panggung internasional sebagai negara yang bersih. Sebelumnya Skotlandia telah berhasil menurunkan kadar emisi gas rumah kaca terbesar dari 15 negara anggota Uni Eropa sejak tahun 1990 hingga 29,6 persen; lebih tinggi dari penurunan rata-rata emisi dari 27 negara anggota Uni Eropa sebesar 17,1 persen, dan tertinggi dari bangsa-bangsa lain di Britania Raya. Selain itu, Skotlandia juga telah berjuang menjaga keadaan iklim global dengan menyiapkan strategi Dana Keadilan Iklim (Climate Justice Fund) pertama di dunia.

Skotlandia sebagai subnegara di Britania Raya memiliki langkah yang terbatas karena Skotlandia merasa tidak memiliki suara langsung di PBB atau Uni Eropa untuk membela tindakan terhadap perubahan iklim sebagai isu penting internasional.

Pemerintah Britania Raya berturut-turut telah gagal untuk memberikan pelayanan yang efektif dari sumber daya minyak dan gas Skotlandia. Dalam beberapa tahun terakhir, rezim fiskal Laut Utara

Britania Raya belum memberikan kepastian dari investasi di sektor minyak dan gas. Selama dekade terakhir ini telah terjadi 16 kali perubahan terhadap rezim fiskal tersebut, dimana perubahan ini menyebabkan Britania Raya mendapat reputasi yang kurang baik akibat dari ketidakstabilan fiskal, menghambat investasi baru, mengurangi rentang kelangsungan beberapa sektor lain serta merusak perekonomian Skotlandia.

Sektor minyak dan gas menjadi bagian utama dari perekonomian Skotlandia sejak 1970-an. Produksi minyak dan gas diperkirakan telah menyumbang sekitar 22 miliar Euro untuk GDP Skotlandia pada tahun 2012. Secara keseluruhan, Skotlandia memiliki cadangan minyak dan gas lepas pantai dengan nilai berkisar 1,5 triliun Euro. Selain itu, Skotlandia diperkirakan memiliki cadangan minyak konvensional terbesar di Uni Eropa, sekitar 60 persen dari total Uni Eropa. Skotlandia juga diperkirakan memiliki volume cadangan gas terbesar kedua di Uni Eropa setelah Belanda. Pemerintah Skotlandia ingin memaksimalkan produksi minyak dan gas dari ladang lepas pantai Skotlandia dengan rezim fiskal yang lebih stabil agar dapat mensejahterakan seluruh rakyat Skotlandia.

Pengoperasian dan pengaturan pasar energi Skotlandia saat ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Britania Raya. Selama bertahun-tahun, Pemerintah Britania Raya dinilai telah gagal untuk mengendalikan sektor energi Skotlandia. Di negeri yang kaya energi seperti Skotlandia, tidak dapat diterima bahwa rakyat menghadapi masalah kenaikan harga, kekurangan

bahan bakar, dan ambisi energi terbarukan Skotlandia belum dapat terpenuhi.

Skotlandia telah menyelenggarakan referendum pada tanggal 18 September 2014 dengan hasil yakni 55.25 persen masyarakat Skotlandia menyatakan tetap bergabung dan 44.65 persen menyatakan berpisah, hal ini berarti bahwa Skotlandia akhirnya gagal mencapai kemerdekaan dan tetap menjadi bagian dari Britania Raya.

Kesimpulan

Uraian penulis mengenai motivasi Skotlandia untuk memisahkan diri dari Britania Raya melalui referendum adalah akibat dari perbedaan pandangan dan gagasan antara Pemerintah Skotlandia dengan Pemerintah Britania Raya mengenai pengambilan keputusan kebijakan di beberapa sektor penting. Pemerintah Skotlandia menganggap keputusan kebijakan di beberapa sektor tersebut tidak sesuai dengan keadaan Skotlandia yang seharusnya. Referendum kemerdekaan yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga ditujukan untuk mempererat hubungan sosial, ekonomi, dan politik Skotlandia dengan sahabat dekatnya yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada.

Pemerintah Skotlandia berambisi menjadikan Skotlandia lebih demokratis, membangun negara yang lebih sejahtera, dan mewujudkan keadilan pada masyarakat. Untuk merealisasikan itu semua maka Pemerintah Skotlandia harus memiliki kontrol wewenang secara utuh tanpa dibatasi oleh Pemerintah Britania Raya. Pemerintah Britania Raya dinilai

kurang memprioritaskan kesejahteraan rakyat Skotlandia, terbukti dari masih banyaknya potensi pengangguran bagi kaum pemuda, bahkan pada tahun 2016 Pemerintah Britania Raya mengakui bahwa sekitar 200.000 anak-anak di Britania Raya (15.000 anak di Skotlandia) berpotensi terdorong ke dalam kemiskinan. Pemerintah Skotlandia merasa mampu untuk mengambil kebijakan sendiri yang lebih efektif mengenai peningkatan kesejahteraan dan menanggulangi ketimpangan sosial.

Skotlandia merupakan sebuah wilayah yang memiliki cadangan minyak konvensional terbesar di Uni Eropa, sekitar 60 persen dari total Uni Eropa. Skotlandia juga diperkirakan memiliki volume cadangan gas terbesar kedua di Uni Eropa setelah Belanda. Sektor minyak dan gas ini telah menjadi bagian utama dari perekonomian Skotlandia sejak 1970-an. Kebijakan Pemerintah Britania Raya dinilai kurang berhasil dalam mengelola sektor minyak dan gas Laut Utara yang seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat Skotlandia. Pemerintah Britania Raya justru menumpuk hutang yang sekarang bernilai lebih dari 1 triliun Euro. Bila dibandingkan dengan Norwegia yang memiliki volume minyak yang setara dengan Skotlandia, pendapatan dari sektor minyak Norwegia kini mencapai 470 miliar Euro.

Untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, sebuah pasar energi yang berfungsi dengan baik akan memberikan hasil terbaik bagi konsumen dalam jangka panjang. Kurangnya investasi di sektor pembangkit energi selama beberapa dekade telah menyebabkan

krisis pasokan energi. Kapasitas pembangkit listrik cadangan di seluruh Britania Raya sekarang berada di tingkat terendah, bahkan dalam jangka panjang diperkirakan masalah ini akan berkontraksi lebih jauh.

Pemerintah Britania Raya mengusulkan untuk mereformasi sektor listrik yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah ini justru dianggap Pemerintah Skotlandia akan menimbulkan resiko besar. Sumber energi yang besar di Skotlandia seharusnya dapat menyediakan pasokan energi jangka panjang dan membantu untuk mempertahankan margin kapasitas pembangkit listrik di Britania Raya. Surplus energi di Skotlandia juga harusnya dapat membantu untuk mencegah kekurangan energi dan lonjakan harga di daerah lain.

Pemerintah Skotlandia berencana untuk menyederhanakan peraturan yang lebih tepat untuk menyatukan fungsi regulasi ekonomi di sektor vital seperti energi, transportasi, komunikasi dan air. Masa depan sektor energi Skotlandia sama dengan negara-negara lain di seluruh dunia yaitu terletak pada energi terbarukan. Dalam jangka panjang, energi terbarukan merupakan cara yang lebih hemat biaya sebagai pembangkit listrik. Transisi ke energi terbarukan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar carbonintensive serta membawa stabilitas harga jangka panjang.

Masyarakat Skotlandia sering merasakan dampak dari kerentanan terjadinya pelanggaran kejahatan terorganisir. Dengan memberikan kesempatan yang positif bagi kaum muda melalui pekerjaan dan pendidikan, hal ini dianggap dapat

membantu kaum muda untuk berpartisipasi penuh dalam terciptanya masyarakat yang lebih kuat dan suasana yang lebih kohesif. Akses untuk mendapatkan pekerjaan dan layanan lainnya dianggap merupakan kunci untuk mengurangi pelanggaran tersebut. Dampak yang timbul dari masalah utang dan kesejahteraan juga menjadi sorotan pada tuntutan pengadilan Skotlandia, tidak hanya mengenai konsekuensi dari kejahatan yang merugikan. Skotlandia yang independen akan memiliki kontrol penuh atas kebijakan kesejahteraan, pekerjaan dan belanja publik dengan memanfaatkan berbagai kekuatan yang tersedia bagi pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman.

Parlemen dan Pemerintah Skotlandia memiliki kesempatan untuk mengatasi masalah keadilan secara signifikan yang akan membantu menentukan sifat masyarakat Skotlandia. Sebuah konstitusi tertulis baru yang direncanakan akan memberi keadilan dan melindungi sistem hukum untuk mendukung supremasi hukum, hak asasi manusia dan demokrasi yang kuat. HAM akan terus dilindungi, karena HAM merupakan hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Skotlandia tahun 1998. Independensi pengadilan, jaksa, polisi, penjara, dan layanan perlindungan masyarakat akan terus dipertahankan.

Skotlandia memiliki kekayaan yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang lebih adil. Tidak ada alasan mengapa Skotlandia tidak bisa sukses seperti negara-negara lain, meskipun setiap negara memiliki perbedaan tetapi ada contoh yang dapat diterapkan seperti

pentingnya modal sosial, rasa kepercayaan, dan tujuan nasional. Dalam mengambil tanggung jawab untuk sistem perlindungan sosial, Skotlandia akan membangun pondasi keuangan yang kuat dengan anggaran perlindungan sosial yang lebih terjangkau dibandingkan Britania Raya secara keseluruhan.

Pemerintah Skotlandia dan Pemerintah Britania Raya memiliki perbedaan dalam menyoroti tindakan untuk mengatasi ketimpangan sosial serta mengatasi masalah kesetaraan. Pemerintah Britania Raya mengakui bahwa sekitar 200.000 anak-anak di Inggris (15.000 anak di Skotlandia) berpotensi terdorong ke dalam kemiskinan relatif pada tahun 2016. Keadilan sosial dan kesetaraan merupakan tujuan yang harus dikejar Pemerintah Skotlandia, karena hal ini juga merupakan aspek-aspek penting dari perbaikan kinerja ekonomi. Negara-negara seperti Norwegia dan Swedia telah berhasil menunjukkan bahwa keadilan dan kemakmuran adalah bagian dari lingkaran yang saling memperkuat dan memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Parlemen dan Pemerintah Skotlandia berambisi membangun sebuah negara demokratis dan modern di Eropa yang didalamnya terdapat lembaga pemerintah, sistem hukum otonom dan peradilan yang independen. Parlemen dan Pemerintah Skotlandia yang demokratis ini akan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Skotlandia atas berbagai kegiatan pemerintahan serta menghapus pengaruh defisit demokrasi di daerah-daerah yang saat ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Britania Raya.

Perlemen Skotlandia merencanakan pembentukan sebuah konstitusi tertulis melalui konvensi konstitusi bersifat terbuka, partisipatif, dan inklusif yang bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat Skotlandia. Sebuah konstitusi tertulis ini merupakan dasar dari kehidupan sehari-hari rakyat Skotlandia dalam menetapkan hak-hak warga negara dan peran pemerintah, juga menetapkan aspirasi mengenai visi dan misi Skotlandia di masa depan. Konstitusi tertulis ini harus dirancang oleh orang-orang dari Skotlandia dan untuk rakyat Skotlandia tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Di negara-negara demokrasi modern, masalah kesetaraan dan hak asasi manusia harus mendapat perhatian lebih oleh pemerintah nasional, lembaga-lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Sementara itu Pemerintah Skotlandia menyadari masih adanya perlakuan diskriminasi hak atas kesetaraan maupun perlindungan dari diskriminasi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dalam masyarakat modern, dan hak asasi manusia sebagai bagian fundamental dari negara yang benar-benar demokratis.

Skotlandia memiliki sejarah panjang dalam melindungi hak-hak dan kebebasan setiap masyarakat di Skotlandia. Pemerintah Skotlandia selama ini telah memanfaatkan kekuasaan yang terbatas dari Pemerintah Britania Raya sampai batas maksimal untuk menciptakan masyarakat yang adil dan lebih setara. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (The European Convention on Human Rights) merupakan bagian intrinsik dari Undang-Undang Skotlandia tahun

1998, dan masalah kesetaraan juga telah mbingkai karya Parlemen Skotlandia yaitu pembentukan Komite Persamaan Kesempatan (Equal Opportunities Committee) juga seluruh rancangan undang-undang Skotlandia.

Pemerintah Skotlandia sangat memprioritaskan sektor pelayanan publik. Pelayanan publik Skotlandia difokuskan pada pembangunan dan peningkatan hasil aset negara serta ketahanan masyarakat. Kekuatan rakyat dianggap dapat mengubah kehidupan dan struktur masyarakat serta menciptakan peluang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Namun, saat ini ada tekanan terhadap pelayanan publik berdasarkan keadaan ekonomi, dan tekanan di masa depan berasal dari perubahan bentuk masyarakat. Sistem pajak dan kesejahteraan Britania Raya dianggap terlalu rumit dan terbukti sulit untuk direformasi. Kantor Audit Nasional (The National Audit Office) telah menemukan bahwa ada masalah yang signifikan dalam mengelola pelaksanaan Kredit Universal (Universal Credit).

Pemerintah Skotlandia mengakui pentingnya merancang pelayanan publik dengan suatu pendekatan yang lebih krusial untuk melayani masyarakat luas dan meningkatkan kekuatan, berbeda dari kontrol Inggris sebelumnya. Pemerintah Skotlandia ingin membangun pelayanan publik ketenagakerjaan dengan menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Skotlandia bisa mengeksplorasi cara-cara baru untuk bekerja di pelayanan publik, yang berarti masyarakat mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan cara yang paling sesuai untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif berdasarkan hak-hak dan

prinsip-prinsip yang telah ditempatkan di jantung konstitusi Skotlandia. Melalui kemerdekaan, Pemerintah Skotlandia dapat memastikan bahwa keputusan tentang kebijakan dan layanan publik akan dilakukan oleh Skotlandia sendiri sejalan dengan pandangan dan kebutuhan rakyat Skotlandia.

Skotlandia telah menyelenggarakan referendum pada tanggal 18 September 2014 dengan hasil yakni 55.25 persen masyarakat Skotlandia menyatakan tetap bergabung dan 44.65 persen menyatakan berpisah, hal ini berarti bahwa Skotlandia akhirnya gagal mencapai kemerdekaan dan tetap menjadi bagian dari Britania Raya.

Daftar Pustaka

Buku

- Aleksius Jemadu, 'Politik Global dalam Teori dan Politik', Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- Horowitz, Donald, 'Irredentas and Secessions: Adjacent Phenomena, Neglected Connection', N. Chazan (ed.) *Irredentism and International Politics*, Lynne Rienner, 1991.
- David Easton dalam Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Georgieff, Anthony, *World: Swedish Report Emphasizes Role of Poverty in War*, Radio Free Europe, Radio Liberty, 2000.
- Hermawan, Yulius P., *Transfromasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu,*

dan Metodologi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.

Kansil, C. S. T., Referendum Sarana Hukum Pemantapan dan Pengamanan UUD 1945, Jakarta, Erlangga, Cetakan Pertama, 1986.

Pleno, Jack C., The International Relation Dictionary, 1992, Wawan Juanda (terj), Abardin, Bandung.

Nasution, Dahlan, Diplomasi IR Politik Internasional (Konsep dan Teori), PT Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga. 1991.

Nurtjahjo, Hendra, 'Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen', Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Soeprapto, R., Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi, dan Perilaku. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Supriyatno, Makmur. Tentang Ilmu Pertahanan, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

The Scottish Government, Scotland's Future Your Guide to An Independent Scotland, Edinburgh, November 2013.

Jurnal

Fusaro, Anthony, 'Two Faces of British Nationalism: The Scottish National Party & Plaid Cymru Compared',

Polity, Vol. 11, No. 3 (Spring, 1979).

Ismail, Fauzi. Libatkan Rakyat dalam Pengambilan Kebijakan, Forum LSM DIY, Yogyakarta, 2005.

Mitchell, James, 2006, 'Evolution and Devolution: Citizenship, Institutions, and Public Policy', Publius, Vol. 36, No. 1 (Winter, 2006).

Pavkovic, Alexander and Radan, Peter (2001) (ed), 'The Ashgate Research to Companion to Secession', UK, MPG Groups Book, 2011.

Santoso, Purwo, dkk (ed). Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. Fisipol UGM: 2004, hal 123.

Siroky, David S., 'Secession and Survival: Nations, States and Violent Conflict', Department of Political Science Duke University, 2009.

Sorens, Jason, 'Secessionism: Identity, Interest, and Strategy', McGill-Queen's Press, 2012.

William N. Dunn dalam Ibnu Syamsi, Diktat Kuliah Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1993, hal. 5.

Dokumen Resmi

Ellis, Tim, 'Scotland's Population The Registrar General's

- Annual Review of Demographic Trends 2014', 160th Edition, 2015, National Records of Scotland.
- McGrath, Francesca, SPICe Briefing 'Scottish Independence Referendum Bill', The Scottish Parliament, 11 September 2013.
- More Powers for the Scottish Parliament - Scottish Government Proposals, The Scottish Government, APS Group Scotland, Edinburgh, October 2014.
- The Scottish Parliamentary Corporate Body Carbon Management Plan 2020, The Scottish Parliamentary, Version 1, April 2013.
- The Benefits of Scotland's EU Membership, The Scottish Government, Edinburgh, 2012.
- Situs/Website**
- "Pelajaran Berharga dari Skotlandia" diakses dari www.neraca.co.id pada 23 Maret 2016.
- 'Alex Salmond announces Scottish independence referendum date' <http://www.theguardian.com/politics/2013/mar/21/scottish-independence-referendum-date> pada 30 Januari 2016.
- "Ini Kesempatan Satu-Satunya, Skotlandia" <http://internasional.kompas.com/read/2014/09/18/04514621/>. Ini.Kesempatan.Satu-Satunya.Skotlandia. pada 30 Januari 2016.
- 'Scotland in Short' <http://www.gov.scot/Resource/Doc/923/0010669.pdf> pada 11 April 2016.
- 'Scotland - Facts, Figures and More' <http://www.scottish-at-heart.com/scotland-facts.html> pada 1 Mei 2016.
- 'Scottish Cities' <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+http://www.dca.gov.uk/constitution/city/citygj.htm#part6> pada 12 April 2016.
- 'Inter-Governmental Relations' <http://www.gov.scot/About/Government/Inter-Governmental> pada 23 Mei 2016.
- 'How Government Works' <http://www.gov.scot/About/Government> pada 23 Mei 2016.
- 'Previous Administrations' <http://www.gov.scot/About/Government/sgprevious> pada 21 Mei 2016.
- Previous Administrations '2007-2011' <http://www.gov.scot/About/Government/sgprevious/2007-2011> pada 21 Mei 2016.
- 'The Scottish Cabinet' <http://www.gov.scot/About/People/Ministers> pada 21 Mei 2016.
- 'Deputy First Minister and Cabinet Secretary for Education and Skills' <http://www.gov.scot/About/People/Ministers/Deputy-First-Minister> pada 21 Mei 2016.
- 'Cabinet Secretary for Finance and the Constitution' <http://www.gov.scot/About/People/Ministers/Cabinet-Secretary-Finance-Constitution> pada 21 Mei 2016.
- 'Cabinet Secretary for Health and Sport' <http://www.gov.scot/About/People/Ministers/Cabinet->

- Secretary-for-Health-and-Wellbeing pada 21 Mei 2016.
- ‘Cabinet Secretary for Environment, Climate Change and Land Reform’
www.gov.scot/About/People/Ministers/Cab-Sec-Environment-ClimateChange-LandReform pada 21 Mei 2016.
- ‘Cabinet Secretary for Culture, Tourism and External Affairs’
<http://www.gov.scot/About/People/Ministers/Cabinet-Secretary-for-Culture-and-External-Affairs> pada 21 Mei 2016.
- ‘Cabinet Secretary for Communities, Social Security and Equalities’
<http://www.gov.scot/About/People/Ministers/Cab-Secretary-Community-Social-Security-Equality> pada 21 Mei 2016.
- ‘Cabinet Secretary for Justice’
<http://www.gov.scot/About/People/Ministers/Cabinet-Secretary-for-Justice> pada 21 Mei 2016.
- ‘Cabinet Secretary for the Economy, Jobs and Fair Work’
www.gov.scot/About/People/Ministers/Cabinet-Secretary-Economy pada 21 Mei 2016.
- ‘Cabinet Secretary for Rural Economy and Connectivity’
<http://www.gov.scot/About/People/Ministers/Cabinet-Secretary-Rural-Economy-Broadband> pada 21 Mei 2016.
- The Scottish People ‘Language’
<http://www.scotland.org/about-scotland/the-scottish-people/language/> pada 23 Mei 2016.
- ‘All About Scottish Kilts’
<http://www.scottish-at-heart.com/scottish-kilts.html> pada 1 Mei 2016.
- ‘Scotch Whiskey’
<http://www.scottish-at-heart.com/scotch-whiskey.html> pada 1 Mei 2016.
- ‘Golf in Scotland’
<http://www.scottish-at-heart.com/golf-scotland.html> pada 1 Mei 2016.
- Scotland’s Referendum ‘Background’
<http://www.scotreferendum.com/information/> pada 3 Juli 2016.
- Scottish Independence Referendum ‘The Process’
<http://scotlandreferendum.info/referendum-process/> pada 29 Mei 2016.
- Countries ‘Member Countries of the EU (year of entry)’
http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm pada 30 Mei 2016.
- ‘The EU in Brief’
http://europa.eu/about-eu/basic-information/about/index_en.htm pada 30 Mei 2016.
- ‘EU Membership’
<http://www.gov.scot/Topics/International/Europe/Benefits-EU-Membership> pada 29 Mei 2016.
- ‘Boosting our economy’
<http://www.gov.scot/Topics/International/Europe/Benefits-EU-Membership/support> pada 29 Mei 2016.
- ‘EU Funding’
<http://www.gov.scot/Topics/International/Europe/Benefits-EU-Membership/Funding> pada 30 Mei 2016.
- ‘Scotland in the USA and Canada’
<http://www.gov.scot/Topics/International/Americas/north-america> pada 31 Mei 2016.

‘Scotland's International Framework’
<http://www.gov.scot/Publications/2012/10/3096> pada 31 Mei 2016.

‘USA Plan (Official Document)’
<http://www.gov.scot/Topics/International/Americas/north-america/usaplan/usa-plan> pada 31 Mei 2016.

‘Canada Plan (Official Document)’
<http://www.gov.scot/Topics/International/Americas/north-america/canadaplan/canadaplan1> pada 2 Juni 2016.

Scottish Independence Referendum
‘Results’
<http://scotlandreferendum.info/>
pada 12 April 2016.

‘How the UK Would Look Like Without Scotland’
<http://www.zerohedge.com/news/2014-09-11/how-uk-would-look-without-scotland> pada 14 Agustus 2016.